

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sistem pajak menjadi peran yang sangat krusial dalam perekonomian suatu negara, tidak terkecuali Indonesia (Meilandri et al., 2025). Optimalisasi penerimaan pajak dapat menciptakan stabilitas ekonomi serta dapat mendukung berbagai sektor pembangunan. Sebagai contoh, sektor kesehatan, sektor pendidikan, serta perkembangan infrastruktur di Indonesia. Pajak berfungsi sebagai *budgetair* atau sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan anggaran negara dan sebagai *regulated* atau sebagai instrument kebijakan fiskal dalam mengatur perekonomian. Dari fungsi ini, Pajak menjadi suatu peran penting dalam alat penerimaan negara. (Fadli, 2023)

Manfaat pajak bagi pendapatan negara sangat besar, karena pajak merupakan sumber pendanaan utama bagi negara. Tanpa optimalisasi penerimaan pajak, negara tidak akan mampu membiayai program-program yang krusial (Aburizal & Maliki, 2025). Oleh karena itu, penanganan pajak yang efisien serta akuntabel menjadi sangat fundamental untuk mencapai tujuan Pembangunan nasional serta melindungi kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan data data realisasi Pendapatan negara pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

Berdasarkan dari data BPS tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, tercatat penerimaan pajak meningkat secara berkala. Sebagai contoh, penerimaan Pajak Dalam Negeri naik sekitar 4% ditahun 2023 dari tahun sebelumnya, kemudian meningkat kembali di tahun 2024 senilai 2%. Dari Pajak Dalam Negeri tersebut, Pajak Penghasilan juga meningkat dengan sangat baik dari tahun 2022 senilai 1,6% di tahun 2023 dan meningkat kembali senilai 1,2% di 2024. Selain itu, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah juga meningkat setiap tahunnya, 2% peningkatan dari tahun 2022, kemudian pada tahun 2024 meningkat 1%. Pada tahun 2024, penerimaan pajak mencapai 2.802,3 Triliun Rupiah dan terus meningkat dari tahun 2022. Walaupun peningkatan penerimaan pajak terlihat fluktuatif, sektor Pajak memiliki dampak yang signifikan dalam stabilitas ekonomi serta pengembangan dana dalam Pembangunan negara.

Salah satu usaha untuk memaksimalkan penerimaan Pajak adalah dengan digitalisasi dengan membuat sistem pajak secara online. Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan transformasi digital untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Modernisasi Teknologi Informasi (TI) dalam perpajakan adalah bentuk reformasi yang tengah dilaksanakan. (Novitasari, 2019) Dengan memberikan akses digitalisasi, wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan mudah dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan peran perpajakannya (Ramadhani & Sitorus, 2022). Di Indonesia, digitalisasi pajak telah mendorong reformasi sistem perpajakan untuk

menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi kepatuhan pajak dan transparansi (Rosyid, 2024). Namun dalam praktiknya, Indonesia masih menghadapi berbagai bentuk kendala dalam digitalisasi sistem Perpajakan ini.

Salah satu sistem yang kini tengah berkembang dalam TI perpajakan adalah CTAS atau yang dikenal dengan *CoreTax Administration System*. Seiring dengan kemajuan teknologi yang berkembang dengan sangat cepat di era big data, maka otoritas perpajakan harus memiliki sebuah sistem administrasi yang dapat mengakomodasi pertukaran data dan informasi dengan berbagai pihak eksternal. Oleh karena itu, penerapan Core Tax menjadi jawaban atas kebutuhan pemerintah (Dimetheo et al., 2024). Seperti yang dilaporkan dari website resmi Pajak.go.id, terdapat 5 permasalahan yang menjadi dasar mengapa pemerintah mengimplementasikan *CoreTax Administration System*: (1) Rendahnya kepatuhan wajib Pajak, (2) Tingkat penerimaan pajak yang meningkat setiap tahunnya, (3) Jumlah sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak, sehingga mengakibatkan sulitnya pengawasan dan penegakan hukum, (4) Pertumbuhan ekonomi digital dan proses teknologi yang sangat cepat, (5) Peraturan yang mengantisipasi perkembangan transaksi perdagangan (Joselin et al., 2024).

Pengembangan *Core Tax* adalah bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) adalah proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (*Commercial Off-the-Shelf*) diiringi dengan

penataan basis data perpajakan. Tujuan utama dari pengembangan *Core Tax* merupakan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. *Core Tax* mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak (DJP, 2024).

Walaupun demikian, sejak awal diluncurkannya sistem *Core Tax* pada Januari 2025 lalu, terdapat banyak kendala yang dikeluhkan pengguna. Dari beberapa artikel yang beredar di media, ada total 34 masalah yang terjadi pada sistem inti ini. Salah satunya adalah status PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang berbeda di sistem yang lama dengan *Core Tax*. Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan masalah dalam pembayaran atas tagihan SKP (Surat Ketetapan Pajak) dan STP (Surat Tagihan Pajak). Beberapa wajib pajak menghadapi kendala untuk pengajuan surat keterangan bebas (SKB) dan layanan KWSP, terutama yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada akhir Desember 2024 atau Januari 2025 (Tempo, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa SI/TI *Core Tax* masih belum memadai terhadap efektivitas dan efisiensi dalam implementasinya.

Audit sistem informasi sendiri adalah sebuah proses pengumpulan dan evaluasi bukti untuk memastikan apakah sistem informasi telah memastikan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai, semua aset dilindungi dengan baik dan tidak disalahgunakan, dan menjamin integritas data, keandalan serta efektivitas dan efisiensi dalam pengoperasian sistem informasi berbasis komputer (Setiajatnika et al., 2020). Dengan menggunakan beberapa *framework*, audit dan analisis dapat dilakukan untuk memastikan bahwa tata kelola TI berjalan

dengan baik. Beberapa acuan standar yang dapat dijadikan framework adalah COBIT, COSO, ITIL dan ISO. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan COBIT (*Control Objectives for Information and related Technology*) yang terdiri dari lima domain dan dikelompokkan menjadi dua area, yaitu area tata Kelola (domain EDM) dan area manajemen (domain APO, BAI, DSS dan MEA). Standar ini dikeluarkan oleh ICASA (*Information Audit and Control Association*) (Wiraniagara & Wijaya, n.d.). Penilaian kematangan (*maturity assessment*) dalam COBIT 5 menggunakan *Capability Model* yang terbagi menjadi 6 level. Penjelasan terkait level proses *Capability* ada pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Level Proses *Capability* COBIT 5

Level 0	<i>Incomplete Process</i>	Prosesnya tidak diimplementasikan atau gagal dalam mencapai tujuannya.
Level 1	<i>Performed Process</i>	Prosesnya diimplementasikan dan mencapai tujuan prosesnya.
Level 2	<i>Managed Process</i>	Prosesnya dikelola dan produk kerja ditetapkan, dikontrol dan dijaga.
Level 3	<i>Established Process</i>	Proses yang ditentukan digunakan berdasarkan proses standar.
Level 4	<i>Predictable Process</i>	Prosesnya diberlakukan dengan konsisten dalam batas yang ditentukan.

Level 5	<i>Optimizing Process</i>	Proses ini secara terus menerus ditingkatkan untuk memenuhi sasaran bisnis terkini.
---------	---------------------------	---

Sumber: ISACA, 2012

Berdasarkan penelitian terdahulu milik (Wiraniagara & Wijaya, n.d.) tentang Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 5 Domain *Deliver, Support And Service*, Studi Kasus: Yayasan Eka Tjipta Jakarta. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 4 sub domain dari domain DSS masih berada di level 1 (*Performed Process*), sedangkan 2 domain lainnya berada pada level 2 (*Managed Process*) dan level 3 (*Established Process*). Hal ini disebabkan oleh dokumentasi dan proses pengelolaan yang masih belum sepenuhnya baik yang dilakukan oleh Yayasan Eka Tjipta Jakarta.

Penelitian lain dalam bentuk skripsi milik (Wiradipta, 2018) tentang Audit Teknologi Informasi dengan Menggunakan *Framework* COBIT 5 Domain DSS (*Deliver, Service and Support*) Pada Rumah Sakit Umum dr. Etty Asharto Batu. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Capability Level* yang dicapai adalah sebesar 1,3 dengan rincian bahwa 2 proses berada di level 0 dan 4 proses lainnya mencapai level 2. Hal ini menunjukkan bahwa RS dr. Etty Asharto Batu masih perlu memberhatikan beberapa proses. Selain itu, adanya gap dengan capability level target sebesar 1,7, disarankan agar pihak rumah sakit membuat sejumlah SOP sesuai dengan proses yang ada dalam framework COBIT 5.

Berdasarkan dengan uraian, fakta serta penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dalam bentuk

skripsi dengan judul “**Audit Sistem Informasi Aplikasi *Core Tax Administration System (CTAS)* Menggunakan Framework COBIT 5 Domain DSS (Delivery, Service and Support)**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini akan mengkaji permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana membuat suatu perencanaan Audit Sistem Informasi Aplikasi *Aplikasi Core Tax Administration System* menggunakan *Framework COBIT 5 Domain DSS (Deliver, Service and Support)*.
2. Bagaimana bentuk evaluasi serta penilaian *Capability Level* Aplikasi *Core Tax Administration System* menggunakan *COBIT 5 Domain DSS (Deliver, Service and Support)*

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan audit terkait sistem informasi *CoreTax* agar mengetahui tingkat kematangan proses layanan TI.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Membuat suatu perencanaan audit sistem informasi *Aplikasi Core Tax Administration System* menggunakan *Framework COBIT 5 Domain DSS (Deliver, Service and Support)*
2. Memberikan evaluasi atau penilaian serta menentukan *Capability Level* *CoreTax Administration System* menggunakan *COBIT 5 domain DSS*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah pengetahuan dan wawasan berpikir dalam bidang perpajakan dan audit sistem informasi serta dapat digunakan sebagai suatu wadah ilmiah untuk pengaplikasian berbagai teori khususnya teori tentang perpajakan dan audit sistem informasi. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca dan penelitian lain dalam bentuk pengembangan informasi dan bentuk referensi atau bahan kajian dalam menambah ilmu pengetahuan tentang perpajakan khususnya tentang audit sistem informasi dalam digitalisasi perpajakan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini memiliki kegunaan agar dapat bermanfaat sebagai suatu bentuk saran dan pertimbangan bagi pemangku kepentingan pajak dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan sistem Informasi Tata Kelola. Selain itu, dengan menggunakan struktur domain DSS COBIT 5, hasil audit dapat menunjukkan tingkat kemampuan proses TI dan memungkinkan manajemen untuk membuat strategi perbaikan yang terarah dan sesuai dengan standar tata kelola TI.